

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022

Jl. Letjen Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

Telp. (0286) 592810

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl Letjen Suprpto, Banjarnegara

Telp. (0286) 592810

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banjarnegara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarnegara, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



SUDIMAN, SH.

N.P. 19701007 199403 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banjarnegara.....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran.....	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap	42
C.3. Aset Lainnya	47
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	48
C.6. Ekuitas	50

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	50
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	50
D.2.	Beban Pegawai.....	51
D.3.	Beban Persediaan	51
D.4.	Beban Jasa.....	52
D.5.	Beban Pemeliharaan	53
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	53
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	54
D.8.	Kegiatan Non Operasional	54
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
E.1.	Ekuitas Awal	55
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	55
E.3.	Koreksi Aset Tetap	56
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	56
E.5.	Kenaikan / Penurunan Ekuitas	56
E.6.	Ekuitas Akhir.....	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	56
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	56
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	57
	Daftar dan Lampiran	60
	Rincian Nilai Perolehan Pengadilan Agama Banjarnegara.....	61
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	62

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Banjarnegara

Jl Letjen Suprpto, Banjarnegara - Jawa Tengah 53418
Telp. (0286) 592810 e-mail : pabanjarnegara@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarnegara, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



SUDIMAN, SH.

NIK. 19701007 199403 1 002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 .

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.200.000,- atau mencapai - persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2022 adalah sebesar Rp. 3.184.919.447,- atau mencapai 59,81 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.324.640.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 15.559.890.000,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 68.597.390,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 15.491.292.610,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 759.939.182,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 759.939.182,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 14.799.950.818,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.200.000,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.808.985.469,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 3.807.785.469). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. (3.807.785.469,-) sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 3.807.785.469,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 15.424.016.840,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 3.807.785.469,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3.183.719.447,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 14.799.950.818,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	1.200.000	0	600.381
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	1.200.000	0	600.381
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	4.002.168.000	2.305.812.690	57,61	3.306.710.085
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.235.472.000	812.181.757	65,74	691.265.278
3.	Belanja Modal	B.2.3.	87.000.000	66.925.000	76,93	64.887.900
	Jumlah Belanja Negara		5.324.640.000	3.184.919.447	59,81	4.062.863.263

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA NERACA PER 30 Juni 2022 DAN 30 Juni 2021 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	36.000.000	30.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	26.225.000	0
Persediaan	C.1. 3.	6.372.390	4.607.400
Jumlah Aset Lancar		68.597.390	34.607.400
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	10.613.780.000	10.613.780.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.913.920.187	1.876.920.187
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.268.037.000	5.238.112.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	12.180.537	11.823.328
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(2.316.625.114)	(2.166.829.712)
Jumlah Aset Tetap		15.491.292.610	15.573.805.803
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	7.400.000	7.400.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(7.400.000)	(7.400.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		15.559.890.000	15.608.413.203
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	722.363.582	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	1.575.600	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	36.000.000	30.000.000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		759.939.182	30.000.000
Jumlah Kewajiban		759.939.182	30.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	14.799.950.818	15.578.413.203
Jumlah Ekuitas Dana		14.799.950.818	15.578.413.203
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		15.559.890.000	15.608.413.203

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

II. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2022 DAN 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.200.000	600.000
Jumlah Pendapatan		1.200.000	600.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.985.723.272	3.296.339.759
Beban Persediaan	D. 3	13.166.810	21.152.450
Beban Barang dan Jasa	D. 4	457.618.638	420.116.367
Beban Pemeliharaan	D. 5	309.681.849	219.183.080
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	42.794.900	23.460.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	151.755.406
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		3.808.985.469	4.132.007.062
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.807.785.469)	(4.131.407.062)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah Surplus /(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	381

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	381
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(3.807.785.469)	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(3.807.785.469)	(4.131.406.681)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2022 DAN 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Ekuitas Awal	E. 1	15.424.016.840	15.15.646.757.147
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.807.785.469)	(4.131.406.681)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar		0	799.855
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	E. 6	0	799.855
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	3.183.719.447	4.062.262.882
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(624.066.022)	(68.343.944)
Ekuitas Akhir		14.799.950.818	15.578.413.203

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

- Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
 - k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banjarnegara

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah **“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara Yang Agung”**

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan **misi** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

2. Terwujudnya sistim pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi perkara sesuai pola bindalmin
4. Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal dan tata laksana kepegawaian yang tertib.
5. Terwujudnya Peningkatan kualitas kerja dan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor barang inventaris milik negara.
7. Terwujudnya Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.
8. Terwujudnya tata kelola tata persuratan dan keuangan yang efektif dan efisien yang mampu terlaksananya kegiatan operasional kantor.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp (*nol rupiah*);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 0 (*nol rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2022 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2021 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan

Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2022.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
1.200.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.200.000,- atau mencapai - persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarnegara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1.200.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
5.	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	0	0	0,00
6.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	1.200.000	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 600.000,- atau 100 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan nominal sewa untuk periode selama 2 (dua) tahun masa sewa sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

Perbandingan realisasi PNPB TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNPB per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.200.000	600.000	600.000	100,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
6.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		1.200.000	600.000	600.000	100,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 3.184.919.447,-

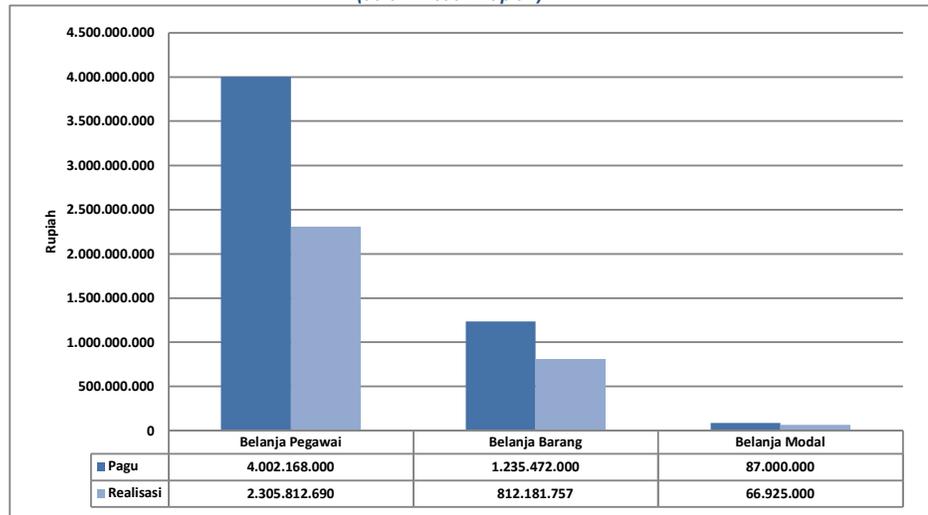
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 3.184.919.447,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 59,81 % dari anggaran senilai Rp. 5.324.640.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.002.168.000	2.305.812.690	57,61
Belanja Barang	1.235.472.000	812.181.757	65,74
Belanja Modal	87.000.000	66.925.000	76,93
Total Belanja Bruto	5.324.640.000	3.184.919.447	59,81
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	5.324.640.000	3.184.919.447	59,81

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam ribuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (877.943.816,-) atau sebesar (21,61) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Adanya penurunan jumlah Pegawai dalam hal ini Hakim karena mutasi dan pensiun;
2. Adanya Penurunan PAGU anggaran tahun 2022,;

Perbandingan realisasi belanja Semester I TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2022	30 Juni 2021	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	2.305.812.690	3.306.710.085	(1.000.897.395)	(30,27%)
Belanja Barang	812.181.757	691.266.278	120.915.479	17,49%
Belanja Modal	66.925.000	64.887.900	2.037.100	3,14%
Total Belanja	3.184.919.447	4.062.863.263	(877.943.816)	(21,61%)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
2.305.997.690,-*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 2.305.997.690,- dan Rp. 3.306.710.085.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami penurunan sebesar (30,26) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah pegawai di Pengadilan Agama Banjarnegara dalam hal ini Hakim.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	786.820.640	982.878.220	(196.057.580)	(19,95%)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.118	10.740	(622)	(5,79%)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57.789.004	74.356.730	(16.567.726)	(22,28%)
Belanja Tunj. Anak PNS	10.674.472	18.376.960	(7.702.488)	(41,91%)
Belanja Tunj. Struktural PNS	18.540.000	20.340.000	(1.800.000)	(8,85%)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.143.440.000	1.789.800.000	(646.360.000)	(36,11%)
Belanja Tunj. PPh PNS	159.864.658	271.427.797	(111.563.139)	(41,10%)
Belanja Tunj. Beras PNS	33.964.980	43.741.680	(9.776.700)	(22,35%)
Belanja Uang Makan PNS	88.844.000	98.823.000	(9.979.000)	(10,10%)
Belanja Tunjangan Umum PNS	6.235.000	7.140.000	(905.000)	(12,68%)
Total Belanja Brutto	2.306.182.872	3.306.895.127	(1.000.712.255)	(30,26%)
Pengembalian Belanja	185.182	185.042	140	0,08%
Total Belanja Netto	2.305.997.690	3.306.710.085	(1.000.712.395)	(30,26%)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
1.441.606.903*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.441.606.903,- dan Rp. 790.077.290,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,81 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perencanaan yang lebih

baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga realisasi belanja lebih besar dari sebelumnya.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Persediaan	14.008.900	22.200.200	(8.191.300)	(36,90%)
Belanja Barang dan Jasa	448.504.408	426.571.998	21.932.410	5,14%
Belanja Pemeliharaan	306.873.549	219.033.080	87.840.469	40,10%
Belanja Perjalanan Dinas	42.794.900	23.460.000	19.334.900	82,42%
Belanja Penyusutan dan Amortisasi	0	0	-	0%
Total Belanja Brutto	812.181.757	691.265.278	120.916.479	17,49%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	812.181.757	691.265.278	120.916.479	17,49%

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal :Rp.
66.925.000,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 66.925.000,- dan Rp. 64.887.900,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,14 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2021. Hal ini disebabkan karena Kenaikan pagu belanja modal TA 2022 di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	37.000.000	64.887.900	(27.887.900)	(42,98%)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.925.000	0	29.925.000	0
Total Belanja Brutto	66.925.000	64.887.900	2.037.100	3,14%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	66.925.000	64.887.900	2.037.100	3,14%

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 68.597.390

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 68.597.390,- dan Rp. 34.607.400,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	36.000.000	30.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	26.225.000	0
Persediaan	6.372.390	4.607.400
Total Aset Lancar	68.597.390	34.607.400

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.
36.000.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 36.000.000,- dan Rp. 30.000.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2022	30 Juni 2021
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	36.000.000	30.000.000
	Jumlah	36.000.000	30.000.000

C.1.2. Persediaan

Persediaan:
Rp. 6.372.390,-

Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.372.390,- dan Rp. 4.607.400,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

No.	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
1	Barang Konsumsi	5.519.590	4.607.400
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	852.800	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		6.372.390	4.607.400

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap:
Rp.
15.491.292.610
,-

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 tersaji sebesar Rp. 15.491.292.610,- dan Rp. 15.573.805.475,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	10.613.780.000	10.613.780.000	-
2	Peralatan dan Mesin	1.913.920.187	1.876.920.187	37.000.000
3	Gedung dan Bangunan	5.268.037.000	5.238.112.000	29.925.000
5	Aset Tetap Lainnya	12.180.537	11.823.000	357.537
	Jumlah	17.807.917.724	17.740.635.187	67.282.537
	Akumulasi Penyusutan	(2.316.625.114)	(2.166.829.712)	(149.795.402)
	Nilai Buku Aset Tetap	15.491.292.610	15.573.805.475	(82.512.865)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
10.613.780.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.613.780.000,- dan Rp. 10.613.780.000,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	3.000	11.28.06.19.4 .00016	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Banjarnegara	9.733.050.000
2.	2	496	005	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Banjarnegara	675.701.000
3.	1	180	11.28.06.12.4 .00011	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Banjarnegara	205.029.000
Jumlah						10.613.780.000

Tidak terdapat Perubahan Pada Nilai Aset Tanah Pengadilan Agama Banjarnegara.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
1.913.920.187,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.913.920.187,- dan Rp. 1.876.920.187,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	1.876.920.187
Mutasi Tambah	37.000.000
Pembelian	37.000.000
Transfer Masuk	0
Koreksi Tim Penerbit	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Nilai Koreksi Temuan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2022	1.913.920.187
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(1.713.534.387)
Nilai Buku 30 Juni 2022	200.385.800

Mutasi tambah Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp. 37.000.000,- yang berasal dari pengadaan belanja modal peralatan dan mesin dimana rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
5.268.037.000,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.268.037.000,- dan Rp. 5.238.112.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2021	5.238.112.000
Mutasi Tambah	59.850.000
Reklasifikasi	0

Koreksi Nilai Tim Penilaian Aset	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	29.925.000
Pengembangan Melalui KDP	29.925.000
Mutasi Kurang	(29.925.000)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Aset	0
Reklasifikasi	(29.925.000)
Saldo per 30 Juni 2022	5.268.037.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(603.090.727)
Nilai Buku 30 Juni 2022	4.664.946.273

Terdapat mutasi baik mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset gedung dan bangunan yang disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan kode aset dimana seharusnya berupa pengembangan langsung namun oleh operator dilakukan pencatatan Penyelesaian Pembangunan sebesar 29.925.000,- sehingga dilakukan reklasifikasi aset berupa Reklas Keluar dan Reklas Masuk sesuai nominal diatas melalui aplikasi SAKTI.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2021	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi	0
Saldo per 30 Juni 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	0
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
12.180.537,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.180.537,- dan Rp. 12.180.537,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	12.180.537
Mutasi Tambah	0
Monografi	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2022	12.180.537
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	0
Nilai Buku 30 Juni 2022	12.180.537

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(2.316.625.114,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing Rp (2.316.625.114,-) dan Rp. (2.166.829.712,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	10.613.780.000	0	10.613.780.000
2	Peralatan dan Mesin	1.913.920.187	1.713.534.387	200.385.800
3	Gedung dan Bangunan	5.268.037.000	603.090.727	4.664.946.273
4	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	0	0	0
5	Konstruksi alam Pekerjaan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	12.180.537	0	12.180.537
	Jumlah	17.740.992.724	2.316.625.114	15.491.292.610

Aset Lainnya:
Rp. 0,-

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021
1	Aset tak Berwujud	7.400.000	7.400.000
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	7.400.000	7.400.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.400.000)	(7.400.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

Mutasi nilai Aset Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2021	7.400.000
Mutasi Tambah	
Reklas Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2022	7.400.000

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(7.400.000)
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak
Berwujud :
Rp. 7.400.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 7.400.000 dan Rp. 7.400.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Anti Virus	4.900.000
2.	Windows Server	2.500.000
Jumlah Total		7.400.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Banjarnegara berupa software dan anti virus yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp.
759.939.182,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 759.939.182,- dan Rp. 30.000.000,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Banjarnegara per 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Uang Muka dari KPPN	36.000.000	30.000.000
Utang Kepada Pihak Ketiga	722.363.582	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	1.575.600	0
Jumlah	759.939.182	30.000.000

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp.
722.363.582,-

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 722.363.582,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Banjarnegara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Hutang Kepada Pihak Ketiga	722.363.582	-
	Jumlah	722.363.582	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 36.000.000
,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 36.000.000 ,- dan Rp. 30.000.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
14.799.950.818,-

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.799.950.818,- dan Rp 15.424.016.840,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2022 terdapat kenaikan nilai kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. 128.759.390,- (1 %) dari nilai per 31 Desember 2021. Jumlah nilai Kewajiban dan ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 15.559.890.000,-, sedangkan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 15.431.130.610,-.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
Pnbp : Rp.
1.200.000,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 1.200.000,- dan Rp. 600.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1.200.000	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
6.	Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	0,00
	Total Pendapatan	0	1.200.000	0,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp.
5.479.072.268

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.479.072.268 dan Rp. 5.418.926.334. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.020.536.520	981.582.820	38.953.700	3,97%
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.522	10.740	2.782	25,90%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	75.737.216	74.227.190	1.510.026	2,03%
Beban Tunj. Anak PNS	13.653.604	18.351.052	(4.697.448)	(25,60%)
Beban Tunj. Struktural PNS	24.300.000	20.340.000	3.960.000	19,47%
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.486.420.000	1.782.600.000	(296.180.000)	(16,62%)
Beban Tunj. PPh PNS	223.904.972	269.708.319	(45.803.347)	(16,98%)
Beban Tunj. Beras PNS	44.248.620	43.741.680	506.940	1,16%
Beban Uang Makan PNS	88.844.000	98.823.000	(9.979.000)	(10,10%)
Beban Tunjangan Umum PNS	8.435.000	7.140.000	1.295.000	18,14%
Total Beban Pegawai	2.986.093.454	3.296.524.801	(310.431.347)	(9,42%)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
: Rp.
15.975.110,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.975.110,- dan Rp. 30.298.078. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	13.166.810	21.152.450	(7.985.640)	(37,75%)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.808.300	150.000	2.658.300	1.772,20%
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	15.975.110	21.302.450	(5.327.340)	(25,01%)

D.4. Beban Jasa

Beban Jasa :
Rp.
686.999.312.

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 686.999.312 dan Rp. 662.847.027. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	344.229.600	294.882.459	49.347.141	16,73%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.040.450	604.500	435.950	72,12%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16.600.000	14.200.000	2.400.000	16,90%
Beban Barang Operasional Lainnya	13.484.000	30.921.040	-17.437.040	-56,39%
Beban Langganan Listrik	34.164.562	30.389.595	3.774.967	12,42%
Beban Langganan Telepon	992.826	1.102.793	-109.967	-9,97%
Beban Langganan Air	695.300	615.980	79.320	12,88%
Beban Sewa	46.291.900	47.400.000	-1.108.100	-2,34%
Total Beban Jasa	457.498.638	420.116.367	37.382.271	8,90%

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.
309.681.849,-*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 309.681.849,- dan Rp. 219.183.080,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245.928.000	149.564.192	96.363.808	64,43%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	373.000	950.000	(577.000)	(60,74%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.572.549	68.518.888	(7.946.339)	(11,60%)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.808.300	150.000	2.658.300	1772,20%
Total Beban Pemeliharaan	309.681.849	219.183.080	90.498.769	41,29%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
42.794.900,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 42.794.900,- dan Rp. 23.460.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	40.594.900	22.690.000	17.904.900	78,91%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	2.200.000	770.000	1.430.000	185,71%
Total Beban Perjalanan Dinas	42.794.900	23.460.000	19.334.900	82,42%

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
0,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 151.755.406,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	76.369.064	(76.369.064)	(100,00%)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	75.386.342	(75.386.342)	(100,00%)
Beban Amortisasi Software	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	151.755.406	(151.755.406)	(100,00%)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0,00%
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0,00%
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0,00%
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	151.755.406	(151.755.406)	(100,00%)

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus (defisit)
Kegiatan Non
Operasional :
Rp. 381*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	381	(381)	(100 %)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0,00
Pendapatan pelunasan Piutang Non bendahara	0	0	0	0,00
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya			0	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0,00
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	381	(381)	(100 %)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.424.016.840,- dan Rp. 15.646.757.147,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar (Rp. 3.807.785.469,-) dan (Rp. 4.131.406.681,-). Defisit LO merupakan selisih kurang

antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp. 0,-*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 799.855,-. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai aset non revaluasi.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas : Rp.
3.183.719.447,-*

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.183.719.447,- dan Rp. 4.062.262.882,-.

E.5. Kenaikan / Penurunan Ekuitas

*Kenaikan /
Penurunan
Ekuitas : Rp. -
624.066.022,-*

Kenaikan / Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. (624.066.022,-) dan Rp. (68.343944,-).

E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.
14.799.950.818,-*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.799.950.818,- dan Rp 15.578.413.203,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Terdapat kesalahan pemilihan kode belanja modal yang dilakukan oleh operator Komitmen yang mengakibatkan kesalahan pencatatan aset belanja modal yaitu Gedung dan Bangunan Kantor Pemerintah Lainnya NUP baru dimana seharusnya tercatat sebagai Pengembangan Aset Gedung dan Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1. Hal yang sama juga terjadi pada pemilihan kode belanja modal peralatan dan mesin dimana yang dipilih adalah Personal Computer dimana seharusnya tercatat sebagai P.C Unit.

Atas hal tersebut diatas dilakukan proses reklasifikasi aset keluar dan masuk sesuai seharusnya, dimana untuk P.C. Unit berhasil dilakukan namun untuk Pengembangan Aset Gedung dan Bangunan Kantor Pemerintah terdapat permasalahan.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang perlu ditindaklanjuti.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual di Pengadilan Banjarnegara pada Semester I Tahun Anggaran 2022.

F.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada Semester I Tahun Anggaran 2022 terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp. 0.

F.2.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banjarnegara adalah:

- 1) BRI KC Jakarta Veteran A/C 653254011061000 a.n. BPG PA BANJARNEGARA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 15.693.600,-.
- 2) BRI A/C 651544011071000 a.n. BPG 164 PA Banjarnegara 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA DIRJEN BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 4.620.000,-.
- 3) Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarnegara A/C 18 000 000 48 a.n. RPL 164 PA Banjarnegara Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak Ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 168.802.500,-

F.2.5. Revisi DIPA dan POK

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Revisi I tanggal 14 Maret 2022;

2) Revisi II tanggal 15 Juli 2022.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB di Pengadilan Agama Banjarnegara pada Semester I TA 2022.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Banjarnegara
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2022

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	465	1.881.394.187	1.718.008.387	163.385.800
1.	Electric Generating Set	1	99.449.850	99.449.850	-
2.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3	315.333.234	315.333.234	-
3.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5	69.555.000	69.555.000	-
4.	Alat Reproduksi (Penggandaan)	1	19.250.000	19.250.000	-
5.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	32	96.147.000	93.308.000	2.839.000
6.	Alat Kantor Lainnya	18	17.141.000	13.951.000	3.190.000
7.	Meubelair	216	361.312.000	340.194.100	21.117.900
8.	Alat Pengukur Waktu	9	446.000	446.000	-
9.	Alat Pendingin	22	101.260.084	95.628.084	5.632.000
10.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use	39	36.006.414	35.666.414	340.000
11.	Peralatan Studio Audio	7	34.413.000	29.345.000	5.068.000
12.	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1	26.000	26.000	-
13.	Alat Komunikasi Telephone	3	1.010.000	1.010.000	-
14.	Alat-Alat Sandi	1	6.000.000	6.000.000	-
15.	Komputer Jaringan	2	45.230.000	17.997.500	27.232.500
16.	Personal Komputer	49	533.865.305	436.055.780	97.809.525
17.	Peralatan Mainframe	1	1.100.000	1.100.000	-
18.	Peralatan Personal Komputer	52	101.539.050	101.382.175	156.875
19.	Peralatan Jaringan	2	42.022.250	42.022.250	-
20.	Peralatan Permainan	1	288.000	288.000	-
B.	Gedung dan Bangunan	6	5.238.112.000	603.090.727	4.635.021.273
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	4.564.931.000	440.661.270	4.124.279.730
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	65.431.000	8.178.872	57.252.128
3.	Tugu/tanda Batas	2	607.750.000	154.260.585	453.489.415
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			7.119.506.187	2.019.548.306	4.798.407.073

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

